

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Konsep yang Mendasari Penelitian**

Pelaksanaan penelitian diperlukan pemahaman mendalam mengenai berbagai konsep yang mendasari penelitian ini. Bagian ini akan menguraikan konsep-konsep kunci yang relevan, dimulai dengan tinjauan mengenai implementasi program sebagai kerangka analisis utama, diikuti dengan pembahasan mengenai lansia, Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) itu sendiri, serta peran pekerjaan sosial dalam mendukung keberhasilan program ini.

##### **2.1.1 Tinjauan tentang Implementasi Program**

Implementasi program merupakan tahapan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Setelah kebijakan atau program ditetapkan, implementasi menjadi proses yang menentukan apakah tujuan yang telah dirancang dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks kebijakan sosial, implementasi program mencerminkan sejauh mana kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan serta dampaknya terhadap kelompok sasaran.

###### **2.1.1.1 Definisi Implementasi Program**

Menurut (Grindle, 1980), implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang menghubungkan kebijakan yang telah dirumuskan dengan hasil nyata di lapangan. Proses ini melibatkan berbagai aktor yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan, baik dari pihak pemerintah, pelaksana di tingkat teknis, maupun penerima manfaat. Selain itu, implementasi juga mencakup organisasi yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan, prosedur yang digunakan

dalam pelaksanaannya, serta sumber daya yang diperlukan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, implementasi bukan sekadar pelaksanaan perintah, tetapi juga mencerminkan bagaimana suatu kebijakan dapat berfungsi dalam realitas sosial dan administratif yang kompleks.

Menurut (Mazmanian dan Sabatier, 1983) mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses penerapan keputusan kebijakan yang mencakup hukum, peraturan, dan keputusan eksekutif yang mengatur program publik. Implementasi dalam konteks ini mencerminkan bagaimana suatu kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan para pelaksana kebijakan di lapangan. Faktor-faktor seperti tingkat kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas koordinasi antarinstansi, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan menjadi aspek krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada rancangan kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam kondisi yang beragam dan dinamis.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamis, yang melibatkan banyak elemen, termasuk kebijakan itu sendiri, pelaksana di berbagai tingkatan, serta lingkungan sosial dan ekonomi tempat kebijakan itu diterapkan. Implementasi yang efektif membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai aktor yang terlibat, dukungan sumber daya yang memadai, serta mekanisme

evaluasi yang dapat memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### **2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program**

Menurut (Ripley dan Franklin, 1986), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang menentukan keberhasilannya, yaitu kepatuhan, koordinasi, sumber daya, serta dukungan politik dan masyarakat. Kepatuhan dalam konteks implementasi kebijakan merujuk pada sejauh mana aktor pelaksana, baik di tingkat birokrasi maupun di lapangan, menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa kebijakan diimplementasikan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah dirancang, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dalam realitasnya, tingkat kepatuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman terhadap kebijakan, insentif yang diberikan, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan. Ketidakepatuhan dapat menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan program, sehingga menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara optimal.

Faktor kedua yang turut menentukan efektivitas implementasi adalah koordinasi, yaitu sinergi antara berbagai lembaga dan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Implementasi program sering kali melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi teknis, hingga organisasi masyarakat. Koordinasi yang baik memastikan bahwa setiap aktor memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjalankan kebijakan, sehingga dapat mengurangi tumpang-tindih wewenang, inefisiensi, serta potensi konflik di

lapangan. Sebaliknya, koordinasi yang lemah dapat menyebabkan miskomunikasi, ketidakefektifan distribusi sumber daya, serta ketidaksesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Oleh karena itu, mekanisme komunikasi dan kerja sama antarinstansi menjadi elemen penting dalam memastikan implementasi berjalan dengan baik.

Sumber daya juga merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Sumber daya dalam konteks ini mencakup tenaga kerja yang kompeten, pendanaan yang cukup, serta sarana dan prasarana yang mendukung keberlangsungan program. Implementasi kebijakan yang efektif membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kapasitas dan pemahaman yang baik terhadap kebijakan yang dijalankan. Selain itu, alokasi anggaran yang mencukupi menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa program dapat berjalan secara berkelanjutan. Kurangnya sumber daya dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan, misalnya dalam bentuk keterbatasan jumlah petugas di lapangan, tidak memadainya infrastruktur pendukung, atau tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk operasional program. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya yang efisien serta strategi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran sangat diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

Dukungan politik dan masyarakat juga berperan besar dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dukungan politik yang kuat, baik dari pemerintah maupun dari pemangku kepentingan lainnya, dapat memberikan legitimasi serta stabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang didukung oleh pemimpin dan pembuat kebijakan akan memiliki peluang lebih besar untuk

berjalan dengan baik karena mendapatkan perhatian dan prioritas dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, dukungan dari masyarakat sebagai penerima manfaat juga sangat penting, karena program yang diterapkan harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Partisipasi masyarakat dalam program dapat meningkatkan efektivitas implementasi, karena mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga turut serta dalam proses pelaksanaan dan evaluasi program. Jika masyarakat tidak mendukung program atau tidak memahami manfaatnya, maka implementasi dapat menghadapi hambatan, seperti rendahnya partisipasi, resistensi, atau bahkan penolakan terhadap kebijakan yang diterapkan.

Pada konteks implementasi program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), keberhasilan program sangat bergantung pada bagaimana faktor-faktor ini dioptimalkan dalam proses pelaksanaan di lapangan. Tingkat kepatuhan aktor pelaksana terhadap regulasi KLJ akan menentukan sejauh mana bantuan ini dapat diterima oleh lansia yang berhak secara tepat sasaran. Koordinasi yang baik antara instansi pemerintah, dinas sosial, serta pihak terkait lainnya akan memastikan bahwa distribusi bantuan berjalan lancar tanpa kendala administratif yang berlebihan. Selain itu, ketersediaan sumber daya seperti pendanaan yang cukup, jumlah tenaga kerja yang memadai, serta sistem pendataan yang akurat menjadi faktor penting dalam menjamin efektivitas program ini. Tak kalah penting, dukungan politik dan masyarakat juga menjadi faktor penentu, karena keberlanjutan program KLJ bergantung pada komitmen pemerintah daerah serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Dengan memahami faktor-faktor ini secara komprehensif, dapat diidentifikasi hambatan yang mungkin muncul

serta strategi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan dampak program KLJ di Kelurahan Cilangkap.

### **2.1.1.3 Model Implementasi Kebijakan**

Model implementasi kebijakan Edward III dikembangkan oleh (George C. Edward III, 1980) dan menekankan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Model ini banyak digunakan dalam analisis kebijakan publik karena memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan di berbagai sektor.

Faktor pertama, komunikasi, berperan penting dalam memastikan kebijakan dapat dipahami dan dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya. Kejelasan, konsistensi, serta efektivitas penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana menjadi kunci utama dalam implementasi kebijakan yang sukses. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan dapat disalahartikan atau bahkan diabaikan oleh pelaksana.

Faktor kedua, sumber daya, mencakup berbagai aspek seperti tenaga kerja, anggaran, waktu, serta fasilitas yang mendukung implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat dan hasil yang diharapkan sulit tercapai. Ketersediaan sumber daya yang cukup memungkinkan pelaksana untuk menjalankan kebijakan dengan optimal dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Faktor ketiga, disposisi (sikap pelaksana), merujuk pada kesediaan dan komitmen individu atau kelompok yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan. Jika pelaksana memiliki sikap yang positif dan mendukung kebijakan, maka implementasi akan berjalan lebih efektif. Sebaliknya, apabila terdapat resistensi atau kurangnya kepedulian dari pelaksana, maka kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya.

Faktor keempat, struktur birokrasi, berkaitan dengan mekanisme organisasi, aturan, serta prosedur yang mengatur implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang fleksibel dan efisien dapat mempercepat proses implementasi, sementara birokrasi yang terlalu kompleks dan rigid dapat menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan. Koordinasi yang baik antarinstansi dan keluwesan dalam prosedur administrasi sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan efektif.

(Ripley dan Franklin, 1986) mengembangkan model implementasi kebijakan yang berfokus pada tiga aspek utama, yaitu kepatuhan (*compliance*), kelancaran (*execution*), dan kinerja (*performance*). Model ini menyoroti bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada bagaimana suatu program dirancang, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dipatuhi, dijalankan, serta dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kelompok sasaran. Dalam konteks kebijakan sosial seperti program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), memahami ketiga aspek ini menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas program Kartu Lansia Jakarta (KLJ).

Kepatuhan (*compliance*) dalam implementasi kebijakan mengacu pada sejauh mana para pelaksana dan penerima manfaat mematuhi aturan serta prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga tujuan awalnya dapat tercapai dengan lebih efektif. Dalam program KLJ, kepatuhan dapat dilihat dari bagaimana pihak penyelenggara, seperti Dinas Sosial dan aparat pemerintah setempat, memastikan bahwa bantuan diberikan kepada lansia yang benar-benar memenuhi kriteria penerima. Selain itu, kepatuhan juga mencakup kesadaran dan kesiapan lansia sebagai penerima manfaat dalam mengikuti prosedur administrasi, seperti pendaftaran, verifikasi data, dan pemanfaatan bantuan yang diberikan. Pada praktiknya, berbagai tantangan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan, seperti kurangnya sosialisasi program, kendala administratif yang rumit, atau kurangnya pemahaman lansia terhadap mekanisme penerimaan bantuan. Oleh karena itu, memastikan kepatuhan yang optimal membutuhkan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan transparansi, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan literasi kebijakan di kalangan penerima manfaat.

Kelancaran (*execution*) dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana program dijalankan di lapangan, termasuk efektivitas proses distribusi bantuan serta hambatan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan. Faktor administratif, kapasitas sumber daya manusia, serta prosedur birokrasi yang diterapkan dalam program sangat mempengaruhi kelancaran implementasi. Dalam kasus KLJ, kelancaran dapat diukur dari sejauh mana proses distribusi bantuan

berjalan tanpa kendala yang berarti, mulai dari tahap pendaftaran hingga penyaluran dana kepada lansia. Proses yang terlalu birokratis, kurangnya tenaga pelaksana yang memadai, atau keterlambatan dalam pencairan dana dapat menjadi kendala yang menghambat efektivitas implementasi program. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa seluruh tahapan program dapat berjalan secara efisien, termasuk penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi sistem pendataan lansia, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah proses administratif dan distribusi bantuan.

Kinerja (*performance*) dalam implementasi kebijakan merupakan aspek yang menilai sejauh mana program telah mencapai tujuan yang telah ditentukan dan memberikan dampak yang diharapkan bagi kelompok sasaran. Evaluasi kinerja mencakup berbagai aspek, seperti efektivitas dalam mencapai target kebijakan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta dampak program terhadap kesejahteraan lansia sebagai penerima manfaat. Dalam konteks KLJ, kinerja program dapat diukur dari bagaimana bantuan yang diberikan mampu meningkatkan kesejahteraan lansia, baik dalam aspek ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Jika kinerja program optimal, maka lansia akan mendapatkan manfaat yang lebih besar, seperti terpenuhinya kebutuhan dasar, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan psikososial akibat adanya dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah. Jika program mengalami berbagai hambatan dalam implementasinya, maka manfaat yang diterima oleh lansia mungkin tidak maksimal, sehingga efektivitas kebijakan perlu dievaluasi dan ditingkatkan.

Dalam penelitian ini, model Ripley dan Franklin digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai implementasi KLJ di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Pendekatan ini membantu memahami sejauh mana kepatuhan dalam pelaksanaan program, kelancaran proses distribusi bantuan, serta kinerja program. Dengan mengkaji aspek kepatuhan, penelitian ini dapat mengidentifikasi apakah kebijakan KLJ telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta apakah terdapat faktor yang menghambat tingkat kepatuhan baik di kalangan pelaksana maupun penerima manfaat. Melalui analisis kelancaran implementasi, penelitian ini dapat mengungkap berbagai tantangan administratif dan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan KLJ, serta bagaimana hambatan tersebut dapat diminimalisir agar program berjalan lebih efektif. Selain itu, dengan menilai kinerja program, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai dampak nyata KLJ terhadap kesejahteraan lansia, serta apakah program ini telah berhasil memenuhi tujuan utamanya dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar lansia di Jakarta.

Dengan memahami implementasi program KLJ berdasarkan model Ripley dan Franklin, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam implementasinya. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa depan, baik dalam hal peningkatan kepatuhan terhadap prosedur, penyederhanaan mekanisme implementasi, maupun optimalisasi kinerja program untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi lansia yang membutuhkan.

#### **2.1.1.4 Strategi Penerapan Implementasi Program**

Strategi penerapan implementasi program menurut Ripley dan Franklin menekankan tiga aspek utama, yaitu kepatuhan, kelancaran, dan kinerja. Untuk memastikan implementasi program berjalan optimal, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat, baik dari segi pelaksana program maupun penerima manfaat (Ripley & Franklin, 1986). Kepatuhan ini dapat dicapai melalui regulasi yang jelas, sosialisasi yang efektif, serta pengawasan yang ketat. Selain itu, kelancaran dalam implementasi program harus diperhatikan dengan memastikan adanya koordinasi yang baik antara lembaga yang terlibat, sumber daya yang mencukupi, serta prosedur yang tidak berbelit-belit (Ripley & Franklin, 1986).

Apabila dalam implementasi program terdapat kekurangan, seperti kurangnya partisipasi penerima manfaat atau kendala dalam distribusi bantuan, maka perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian strategi. Langkah yang harus dilakukan mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan birokrasi, serta penggunaan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah penyaluran program (Ripley & Franklin, 1986). Selain itu, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan serta memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai secara efektif.

## **2.1.2 Tinjauan Mengenai Lansia**

Lansia merupakan individu yang telah mencapai tahap akhir dalam siklus kehidupan. Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai lansia sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan mereka.

### **2.1.2.1 Pengertian Lansia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, seseorang dikategorikan sebagai lanjut usia apabila telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Definisi ini sejalan dengan ketetapan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2015), yang juga menetapkan bahwa lansia adalah individu yang telah berusia 60 tahun atau lebih. Lansia merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai permasalahan, baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Seiring bertambahnya usia, individu mengalami berbagai perubahan fisik dan kognitif yang dapat berdampak pada penurunan fungsi tubuh serta peningkatan risiko penyakit degeneratif, seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan kognitif seperti demensia. Selain itu, penurunan mobilitas dan daya tahan tubuh juga dapat membatasi aktivitas lansia, sehingga mereka memerlukan perhatian khusus dalam upaya menjaga kesejahteraan mereka.

Lansia juga menghadapi tantangan dalam kehidupan sosial. Seiring dengan menurunnya kemampuan fisik dan kognitif, banyak lansia mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi aktif di masyarakat. Mereka sering kali

menghadapi kondisi isolasi sosial akibat berbagai faktor, seperti perubahan dalam struktur keluarga, kehilangan pasangan hidup, atau berkurangnya interaksi sosial karena anak-anak mereka telah mandiri dan memiliki kehidupan sendiri. Isolasi sosial ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi psikologis lansia, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, serta perasaan kesepian yang berkepanjangan. Oleh karena itu, upaya untuk mempertahankan keterlibatan sosial lansia melalui kegiatan komunitas, dukungan keluarga, dan program sosial menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Segi ekonomi, banyak lansia menghadapi tantangan akibat menurunnya produktivitas serta keterbatasan dalam memperoleh pendapatan. Lansia yang sebelumnya bekerja dan memiliki penghasilan tetap sering kali mengalami kesulitan setelah memasuki masa pensiun, terutama jika mereka tidak memiliki tabungan atau jaminan sosial yang memadai. Ketergantungan finansial terhadap keluarga atau bantuan sosial dari pemerintah menjadi realitas yang dihadapi oleh banyak lansia, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi lemah. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, lansia berisiko mengalami penurunan kualitas hidup akibat keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, serta akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan kesejahteraan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lansia serta penyediaan jaminan sosial menjadi aspek krusial dalam memastikan kesejahteraan mereka.

Perhatian terhadap kelompok ini menjadi bagian penting dalam berbagai kebijakan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup

mereka. Pemerintah, melalui berbagai program sosial seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), berupaya untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada lansia agar mereka tetap dapat hidup dengan martabat dan kesejahteraan yang layak. Selain intervensi dari pemerintah, dukungan dari keluarga dan masyarakat juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam menjaga kesejahteraan lansia. Pendekatan yang holistik, yang mencakup aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, perlu diterapkan agar lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih baik, tetap produktif, serta memiliki kualitas hidup yang optimal.

#### **2.1.2.2 Karakteristik Lansia**

Lansia memiliki karakteristik khas yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, yang masing-masing membawa tantangan tersendiri dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dari segi fisik, lansia mengalami berbagai perubahan yang berkaitan dengan proses penuaan alami, seperti melemahnya sistem kekebalan tubuh, berkurangnya elastisitas kulit, serta penurunan fungsi organ tubuh, termasuk jantung, paru-paru, dan ginjal (Santrock, 2012). Selain itu, lansia cenderung mengalami penurunan massa otot dan kepadatan tulang, yang meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis dan patah tulang. Gangguan penglihatan dan pendengaran juga menjadi permasalahan umum di kalangan lansia, yang dapat membatasi aktivitas sehari-hari serta mengurangi kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kondisi ini menyebabkan lansia lebih rentan terhadap berbagai penyakit degeneratif, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular, yang memerlukan perhatian khusus dalam hal kesehatan dan perawatan. Oleh karena itu, pemantauan kesehatan yang rutin, pola

hidup sehat, serta akses terhadap layanan kesehatan yang memadai sangat diperlukan untuk menjaga dan mencegah komplikasi penyakit yang lebih serius.

Secara psikologis, lansia sering menghadapi berbagai tantangan emosional yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Perasaan kesepian, kecemasan, dan depresi sering kali muncul akibat perubahan peran sosial, pensiun dari pekerjaan, atau kehilangan pasangan hidup dan orang-orang terdekat (Papalia & Feldman, 2014). Pensiun dapat menyebabkan lansia merasa kehilangan identitas dan tujuan hidup, terutama jika mereka sebelumnya memiliki peran aktif dalam dunia kerja. Selain itu, kehilangan pasangan hidup menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kesedihan mendalam pada lansia, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi depresi berkepanjangan. Tantangan psikologis ini juga dapat diperburuk oleh menurunnya fungsi kognitif, seperti gangguan daya ingat dan risiko penyakit neurodegeneratif seperti demensia atau Alzheimer. Dalam kondisi ini, dukungan emosional dari keluarga dan lingkungan sosial sangat penting untuk membantu lansia beradaptasi dengan perubahan yang mereka alami. Keterlibatan dalam aktivitas yang menyenangkan, seperti hobi, interaksi sosial, serta terapi psikologis jika diperlukan, dapat membantu menjaga kesehatan mental mereka dan mengurangi risiko gangguan psikologis.

Pada aspek sosial, lansia sering mengalami perubahan dalam interaksi sosial, baik dengan keluarga maupun masyarakat. Seiring bertambahnya usia, jaringan sosial lansia cenderung menyusut akibat berkurangnya teman sebaya yang telah meninggal atau mengalami keterbatasan fisik. Lansia yang tidak

memiliki dukungan sosial yang memadai cenderung mengalami isolasi sosial yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional mereka (Cumming & Henry, 1961). Isolasi sosial ini sering kali diperparah oleh berbagai faktor, seperti perubahan pola tinggal yang menyebabkan lansia hidup sendiri tanpa pendamping, kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta keterbatasan mobilitas yang membatasi interaksi mereka dengan lingkungan sekitar. Isolasi sosial yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko gangguan kognitif serta mempercepat proses penuaan karena kurangnya stimulasi sosial dan intelektual. Oleh karena itu, partisipasi lansia dalam berbagai kegiatan sosial dan komunitas sangat diperlukan untuk menjaga kualitas hidup mereka. Program-program berbasis komunitas, seperti kelompok lansia, kegiatan keagamaan, serta program rekreasi yang melibatkan lansia, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keterlibatan sosial mereka. Selain itu, peran keluarga dalam mendukung dan memberikan perhatian kepada lansia sangat berpengaruh dalam menjaga kesejahteraan sosial mereka.

Upaya untuk memahami karakteristik lansia dari berbagai aspek, baik fisik, psikologis, maupun sosial, dapat disusun strategi yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan mereka. Pemerintah, keluarga, serta masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah lansia, yang tidak hanya menyediakan akses terhadap layanan kesehatan yang optimal, tetapi juga memastikan bahwa lansia tetap dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan mendapatkan dukungan emosional yang mereka butuhkan. Melalui

pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, lansia dapat menjalani kehidupan yang lebih berkualitas, sehat, dan sejahtera di masa tua mereka.

### **2.1.2.3 Kebutuhan Dasar Lansia**

Lansia memiliki berbagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak, sehat, dan sejahtera. Salah satu kebutuhan utama adalah kebutuhan fisiologis, yang mencakup asupan nutrisi yang seimbang, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta tempat tinggal yang layak dan aman (Maslow, 1943). Lansia memerlukan pola makan yang sehat dan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit degeneratif, seperti osteoporosis, diabetes, serta gangguan kardiovaskular. Selain itu, lansia juga membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, pengobatan penyakit kronis, serta rehabilitasi medis jika diperlukan. Tidak kalah penting, lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman juga menjadi faktor utama dalam kesejahteraan lansia. Rumah yang ramah lansia, dengan fasilitas yang memadai seperti pegangan tangan di kamar mandi dan aksesibilitas yang baik, dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan cedera, terutama bagi lansia yang mengalami keterbatasan mobilitas.

Lansia juga memiliki kebutuhan psikologis dan sosial yang harus dipenuhi agar mereka dapat menjalani kehidupan dengan perasaan bahagia dan bermakna. Pada tahap kehidupan ini, banyak lansia mengalami perubahan besar, seperti pensiun dari pekerjaan, kehilangan pasangan hidup, serta berkurangnya peran dalam keluarga dan masyarakat. Perubahan-perubahan ini dapat menimbulkan

perasaan kesepian, kecemasan, bahkan depresi jika tidak ditangani dengan baik (Erikson, 1982). Oleh karena itu, lansia membutuhkan rasa dihargai dan tetap memiliki peran dalam keluarga serta lingkungan sosial mereka. Dukungan emosional dari keluarga, sahabat, dan komunitas sangat penting dalam membantu lansia menghadapi berbagai perubahan dalam hidup mereka. Keterlibatan dalam aktivitas sosial, seperti kelompok lansia, kegiatan keagamaan, atau hobi yang bermanfaat, dapat membantu menjaga kesehatan mental serta meningkatkan rasa percaya diri dan kebahagiaan mereka. Lansia yang tetap aktif dalam kehidupan sosial cenderung memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik dibandingkan mereka yang mengalami isolasi sosial.

Dukungan ekonomi juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam kesejahteraan lansia. Setelah memasuki usia lanjut, banyak individu yang tidak lagi memiliki sumber pendapatan tetap karena sudah pensiun dari pekerjaan. Bagi lansia yang tidak memiliki tabungan pensiun atau jaminan sosial, kondisi ini dapat menjadi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, program bantuan sosial dari pemerintah, seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), sangat berperan dalam membantu lansia dari kelompok ekonomi lemah agar tetap dapat menjalani kehidupan yang layak. Selain itu, lansia yang masih memiliki kemampuan dan keinginan untuk tetap bekerja harus diberikan kesempatan untuk tetap produktif, misalnya melalui program pelatihan keterampilan, pekerjaan paruh waktu, atau wirausaha kecil yang sesuai dengan kondisi mereka. Dengan demikian, lansia dapat tetap mandiri secara finansial dan tidak sepenuhnya bergantung pada keluarga atau bantuan sosial.

Pemenuhan kebutuhan lansia secara menyeluruh, baik dari aspek fisiologis, psikologis, sosial, maupun ekonomi, sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemerintah, keluarga, serta masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan lansia. Selain melalui kebijakan dan program kesejahteraan sosial, kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap lansia juga perlu ditingkatkan agar mereka tetap mendapatkan penghormatan, perhatian, serta kesempatan untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, lansia dapat menikmati masa tua yang lebih bahagia, sehat, dan sejahtera.

#### **2.1.2.4 Pengertian Kebutuhan Dasar Lansia**

Kebutuhan dasar lansia secara umum didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap posisi mereka dalam kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup, serta dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar, dan kepedulian mereka (WHO, 1996). Definisi ini menunjukkan bahwa kualitas hidup bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang menilai kehidupannya berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitarnya. Dalam konteks lansia, kualitas hidup tidak hanya mencerminkan kondisi kesehatan fisik mereka, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang berperan dalam menentukan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Lansia yang memiliki kebutuhan dasar lansia yang baik adalah mereka yang dapat menjalani hari tua dengan sehat, mandiri, serta tetap memiliki rasa harga diri dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Lawton (1991), kualitas hidup lansia dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu kompetensi individu, lingkungan fisik, hubungan sosial, dan kesejahteraan emosional. Kompetensi individu merujuk pada kemampuan lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari, baik dalam aspek fisik maupun kognitif. Lansia yang memiliki kompetensi fisik yang baik cenderung lebih mandiri dalam melakukan berbagai kegiatan tanpa harus bergantung pada orang lain. Sebaliknya, lansia dengan keterbatasan fisik atau gangguan kognitif, seperti demensia, mungkin memerlukan bantuan dari keluarga atau tenaga perawat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kompetensi individu lansia dapat dilakukan melalui program-program kesehatan, seperti pemeriksaan rutin, terapi fisik, dan edukasi mengenai gaya hidup sehat yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh serta fungsi kognitif mereka.

Lingkungan fisik juga berperan penting dalam menentukan kualitas hidup lansia. Lansia memerlukan lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan mendukung mobilitas mereka. Fasilitas yang ramah lansia, seperti jalan yang rata, pegangan tangan di kamar mandi, serta akses transportasi yang mudah, dapat membantu mereka tetap aktif dan mandiri. Lingkungan yang kurang mendukung, seperti rumah dengan banyak tangga tanpa pegangan atau kurangnya akses terhadap fasilitas publik, dapat membatasi mobilitas lansia dan meningkatkan risiko kecelakaan atau jatuh. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur yang ramah lansia, baik di lingkungan rumah maupun di ruang publik, menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Faktor lainnya yang sangat berpengaruh adalah hubungan sosial, yang mencakup interaksi lansia dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Hubungan sosial yang baik dapat memberikan rasa keterikatan dan dukungan emosional bagi lansia, yang pada akhirnya meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Lansia yang memiliki jaringan sosial yang luas cenderung lebih aktif dan memiliki tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan mereka yang mengalami isolasi sosial. Sebaliknya, kurangnya interaksi sosial dapat menyebabkan perasaan kesepian dan bahkan depresi. Oleh karena itu, partisipasi dalam kegiatan komunitas, seperti kelompok lansia, kegiatan keagamaan, atau aktivitas sosial lainnya, sangat dianjurkan untuk menjaga keseimbangan psikososial lansia. Dukungan dari keluarga juga menjadi aspek yang tidak kalah penting, karena lansia yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari anggota keluarga cenderung memiliki kondisi mental yang lebih baik.

Kesejahteraan emosional juga menjadi faktor penentu dalam kualitas hidup lansia. Lansia yang memiliki kesejahteraan emosional yang baik biasanya mampu menghadapi perubahan dalam hidup mereka dengan sikap yang lebih positif. Faktor-faktor seperti penerimaan diri, rasa percaya diri, serta kemampuan untuk tetap menikmati hidup sangat mempengaruhi kondisi psikologis lansia. Perubahan besar dalam hidup, seperti kehilangan pasangan, pensiun, atau berkurangnya peran dalam keluarga, dapat menjadi tantangan emosional yang berat. Oleh karena itu, dukungan psikologis melalui konseling, terapi kelompok, atau aktivitas yang menyenangkan dapat membantu lansia menjaga kesehatan mental mereka.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, upaya peningkatan kualitas hidup lansia harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Program-program yang mendukung lansia, seperti layanan kesehatan yang terjangkau, infrastruktur yang ramah lansia, serta kegiatan sosial yang melibatkan mereka, dapat membantu lansia menjalani masa tua dengan lebih bermakna. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis kebutuhan lansia, diharapkan mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan sejahtera di usia lanjut.

#### **2.1.2.5 Dimensi Kualitas Hidup Lansia**

Kualitas hidup lansia merupakan aspek yang kompleks dan mencakup berbagai dimensi yang saling berkaitan. WHO melalui instrumen WHOQOL-OLD (World Health Organization Quality of Life for Older Adults) mengklasifikasikan dimensi kualitas hidup lansia ke dalam enam aspek utama yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan lanjut usia. Pemahaman terhadap keenam dimensi ini sangat penting dalam merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Dengan menyesuaikan intervensi sosial dan kebijakan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan lansia berdasarkan dimensi ini, diharapkan lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih baik, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Dimensi pertama adalah fungsi sensorik, yang mencakup pengaruh dari penurunan fungsi pendengaran dan penglihatan terhadap kehidupan sehari-hari (WHO, 2006). Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami perubahan fisiologis yang menyebabkan gangguan sensorik, seperti menurunnya daya dengar

(presbikusis) dan gangguan penglihatan (misalnya katarak atau degenerasi makula). Gangguan ini dapat membatasi kemampuan lansia dalam berkomunikasi, berpartisipasi dalam aktivitas sosial, serta menjalani aktivitas harian secara mandiri. Lansia yang mengalami keterbatasan sensorik cenderung lebih rentan mengalami isolasi sosial dan gangguan psikologis, seperti depresi dan kecemasan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan perawatan kesehatan sensorik, seperti pemeriksaan rutin mata dan pendengaran serta penyediaan alat bantu seperti kacamata dan alat bantu dengar, menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup lansia dalam dimensi ini.

Dimensi kedua adalah otonomi, yang menggambarkan sejauh mana lansia dapat menjalani hidup secara mandiri dan membuat keputusan sendiri (Power et al., 2005). Kemandirian merupakan faktor kunci dalam menentukan kesejahteraan lansia, karena lansia yang mampu menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa bergantung pada orang lain cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Kemandirian ini mencakup berbagai aspek, seperti kemampuan untuk mengatur keuangan sendiri, mengambil keputusan pribadi, serta mengelola aktivitas harian, seperti memasak, berpakaian, atau berjalan tanpa bantuan. Kondisi kesehatan yang menurun, ketergantungan pada anggota keluarga, serta lingkungan yang tidak ramah lansia dapat menghambat tingkat kemandirian mereka. Oleh karena itu, dukungan dalam bentuk aksesibilitas lingkungan, program rehabilitasi fisik, serta pemberdayaan lansia dalam pengambilan keputusan penting bagi kesejahteraan mereka.

Dimensi ketiga adalah aktivitas sosial, yang melibatkan partisipasi lansia dalam kegiatan sosial dan komunitas (WHO, 2006). Aktivitas sosial menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan psikologis dan emosional lansia. Lansia yang tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti mengikuti kelompok lansia, kegiatan keagamaan, atau menjadi sukarelawan, cenderung memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik. Keterlibatan dalam aktivitas sosial memberikan mereka perasaan dihargai, memiliki makna dalam kehidupan, serta memperkuat hubungan sosial dengan orang lain. Sebaliknya, lansia yang mengalami isolasi sosial cenderung lebih mudah mengalami stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Oleh karena itu, penyediaan program yang mendorong keterlibatan lansia dalam komunitas serta lingkungan yang mendukung aktivitas sosial menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dimensi keempat adalah kepuasan terhadap masa depan, yang berkaitan dengan harapan dan rencana lansia dalam menjalani sisa hidupnya (Bowling, 2005). Harapan terhadap masa depan sangat berpengaruh pada kesejahteraan emosional lansia, karena individu yang memiliki tujuan dan harapan dalam hidupnya cenderung lebih optimis dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, dukungan sosial, serta kesempatan untuk terus belajar dan berkontribusi dalam masyarakat berperan dalam membentuk tingkat kepuasan lansia terhadap masa depan mereka. Lansia yang merasa tidak memiliki harapan atau arah hidup lebih rentan mengalami perasaan putus asa dan kesepian. Oleh karena itu, program sosial yang mendorong lansia untuk tetap aktif, memiliki aktivitas yang bermakna, serta memberikan akses terhadap

layanan kesejahteraan dapat membantu mereka mempertahankan kepuasan terhadap kehidupan mereka di masa tua.

Dimensi kelima adalah kemampuan menghadapi kehilangan, yang mencakup kemampuan lansia dalam menghadapi perubahan dan kehilangan orang-orang terdekat (Power et al., 2005). Kehidupan di usia lanjut sering kali diwarnai dengan berbagai kehilangan, baik dalam bentuk kehilangan pasangan, teman sebaya, anggota keluarga, hingga kehilangan peran dalam keluarga atau masyarakat. Kemampuan individu dalam menghadapi kehilangan ini sangat mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka. Lansia yang memiliki dukungan sosial yang kuat dari keluarga, teman, atau komunitas cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi kehilangan secara lebih baik. Sebaliknya, lansia yang mengalami isolasi sosial cenderung lebih sulit mengatasi rasa duka dan kesedihan, yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, keberadaan layanan konseling, dukungan sosial, serta kesempatan untuk tetap aktif dalam kegiatan sosial dapat membantu lansia dalam menghadapi kehilangan dengan cara yang lebih sehat secara emosional.

Dimensi terakhir adalah kualitas hubungan interpersonal, yang menggambarkan seberapa baik lansia dalam menjaga interaksi dengan keluarga dan lingkungan sosial mereka (WHO, 2006). Hubungan interpersonal yang harmonis dengan keluarga, teman, dan komunitas sangat berperan dalam kesejahteraan lansia. Lansia yang memiliki hubungan sosial yang positif cenderung merasa lebih bahagia, memiliki rasa harga diri yang lebih tinggi, serta lebih sedikit mengalami masalah kesehatan mental. Kualitas hubungan

interpersonal tidak hanya mencakup frekuensi interaksi sosial, tetapi juga aspek emosional dalam hubungan tersebut, seperti perasaan dihargai, didengar, dan dicintai oleh orang-orang di sekitar mereka. Dukungan keluarga menjadi aspek yang sangat penting, karena lansia yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari anggota keluarga cenderung memiliki kondisi psikologis yang lebih stabil. Oleh karena itu, membangun lingkungan sosial yang inklusif dan memberikan ruang bagi lansia untuk tetap terlibat dalam interaksi sosial adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Upaya dalam memahami berbagai dimensi kualitas hidup lansia yang dikembangkan oleh WHO melalui WHOQOL-OLD, program kesejahteraan sosial, termasuk Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dapat lebih terarah dalam meningkatkan kesejahteraan lansia secara menyeluruh. Program ini dapat memperhatikan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, serta psikologis lansia, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih layak dan bermartabat. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis kebutuhan lansia, diharapkan kebijakan kesejahteraan sosial dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia di Indonesia.

#### **2.1.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Lansia**

Kualitas hidup lansia merupakan hasil dari interaksi antara berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitar. Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan kesejahteraan lansia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta mempengaruhi sejauh mana mereka dapat tetap mandiri, sehat, dan memiliki keseimbangan emosional. Secara umum,

faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hidup lansia dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal mencakup berbagai aspek yang berasal dari dalam diri individu, seperti kondisi kesehatan fisik dan mental, tingkat pendidikan, serta kebiasaan hidup yang dijalani. Kondisi kesehatan fisik dan mental merupakan faktor utama dalam menentukan kualitas hidup lansia. Lansia dengan kondisi kesehatan yang baik cenderung lebih mampu menjalani kehidupan secara mandiri dan memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lansia yang mengalami penyakit kronis atau keterbatasan fisik (Binstock & George, 2011). Penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan artritis sering kali menjadi hambatan dalam aktivitas sehari-hari lansia dan dapat menurunkan kualitas hidup mereka. Selain itu, kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan juga dapat mempengaruhi kesejahteraan lansia, terutama jika mereka mengalami kesepian atau kehilangan pasangan hidup.

Selain kesehatan, tingkat pendidikan juga memainkan peran penting dalam kualitas hidup lansia. Lansia dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses informasi yang lebih baik mengenai kesehatan, pola hidup sehat, serta kebijakan kesejahteraan yang dapat mereka manfaatkan. Pendidikan juga berkontribusi dalam membentuk pola pikir yang lebih positif dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan di usia lanjut. Lansia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, seperti mencari layanan kesehatan atau memanfaatkan program sosial yang tersedia.

Faktor internal lainnya adalah kebiasaan hidup, yang meliputi pola makan, aktivitas fisik, dan kebiasaan merawat diri. Pola makan yang seimbang, dengan asupan nutrisi yang cukup, sangat berpengaruh terhadap kesehatan lansia dan mencegah berbagai penyakit degeneratif yang umum terjadi pada usia lanjut. Konsumsi makanan bergizi seperti buah, sayur, protein sehat, dan asupan cairan yang cukup dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dan kebugaran fisik. Selain itu, aktivitas fisik seperti berjalan kaki, yoga, atau senam lansia juga dapat meningkatkan kebugaran tubuh, memperkuat otot, dan menjaga fleksibilitas sendi (Kendig & Phillipson, 2014). Kebiasaan hidup sehat lainnya, seperti menghindari rokok dan alkohol, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan, juga sangat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia.

Selain faktor internal, kualitas hidup lansia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga kesejahteraan lansia. Lansia yang memiliki hubungan sosial yang baik cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih stabil serta merasa lebih dihargai dalam masyarakat (Cattan et al., 2005). Kehidupan sosial yang aktif dapat membantu lansia mengurangi rasa kesepian, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan mereka kesempatan untuk tetap merasa berguna dalam lingkungan sosial mereka. Hubungan yang harmonis dengan keluarga juga memberikan rasa aman secara emosional dan membantu lansia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Faktor ekonomi juga berperan dalam menentukan kesejahteraan lansia. Lansia yang memiliki kondisi ekonomi yang baik, seperti pensiun yang mencukupi atau dukungan finansial dari keluarga, cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, serta gaya hidup yang lebih nyaman. Sebaliknya, lansia yang mengalami kesulitan ekonomi sering kali menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, obat-obatan, atau biaya perawatan kesehatan. Oleh karena itu, keberadaan program jaminan sosial, seperti bantuan keuangan dan layanan kesehatan gratis, sangat berperan dalam memastikan bahwa lansia tetap memiliki kualitas hidup yang baik di masa tua mereka.

Selain faktor sosial dan ekonomi, kebijakan pemerintah juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas hidup lansia. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, seperti Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang memberikan bantuan finansial kepada lansia di DKI Jakarta. Kebijakan lain yang mendukung lansia mencakup jaminan kesehatan nasional, fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah lansia, serta program pemberdayaan lansia yang memungkinkan mereka untuk tetap aktif dan produktif dalam masyarakat. Keberadaan kebijakan yang berpihak pada lansia dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial serta memastikan bahwa lansia mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang mereka butuhkan.

Secara keseluruhan, kualitas hidup lansia ditentukan oleh kombinasi dari faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Untuk memastikan lansia

dapat menjalani masa tua dengan baik, diperlukan pendekatan yang holistik yang mencakup perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental, pemberian dukungan sosial dan ekonomi, serta kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan lansia. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup lansia, baik individu, keluarga, komunitas, maupun pemerintah dapat berperan lebih aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan lansia di Indonesia.

#### **2.1.2.7 Perlindungan Sosial Bagi Lansia**

Perlindungan sosial bagi lansia merupakan upaya negara dan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan lansia agar dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Menurut laporan "Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia" yang diterbitkan oleh PRAKARSA (2020), lansia di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, ketergantungan ekonomi, serta minimnya program jaminan sosial yang menjangkau kelompok ini secara menyeluruh.

Secara umum, perlindungan sosial bagi lansia mencakup tiga aspek utama, yaitu jaminan sosial, bantuan sosial, dan layanan sosial. Jaminan sosial merupakan perlindungan yang diberikan melalui skema asuransi sosial, seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan, yang bertujuan memberikan kepastian pendapatan setelah masa kerja berakhir. Namun, cakupan program ini masih terbatas, terutama bagi lansia yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki akses terhadap sistem jaminan sosial formal.

Selain itu, bantuan sosial berperan sebagai intervensi pemerintah dalam mendukung lansia miskin yang tidak memiliki jaminan sosial. Salah satu program utama adalah Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang memberikan bantuan tunai kepada lansia miskin di DKI Jakarta guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, laporan PRAKARSA (2020) menyoroti bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penyaluran bantuan sosial akibat data penerima yang tidak selalu akurat serta keterbatasan anggaran yang menghambat cakupan program ini di daerah lain di Indonesia.

Layanan sosial bagi lansia mencakup berbagai program yang mendukung kesejahteraan lansia dalam aspek kesehatan, psikososial, dan akses terhadap lingkungan yang ramah lansia. Layanan ini mencakup panti sosial, pendampingan komunitas, serta program berbasis keluarga yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia. Namun, PRAKARSA (2020) mencatat bahwa jumlah fasilitas pelayanan sosial untuk lansia di Indonesia masih sangat terbatas, dan banyak lansia yang belum mendapatkan akses terhadap layanan ini.

Secara keseluruhan, sistem perlindungan sosial bagi lansia di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal cakupan program, ketersediaan anggaran, serta efektivitas dalam menjangkau lansia miskin dan rentan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan setiap lansia mendapatkan hak perlindungan sosial yang memadai guna meningkatkan kualitas hidup mereka di usia lanjut.

### **2.1.3 Tinjauan mengenai Program dan Pelayanan bagi Lanjut Usia**

Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lanjut usia yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi rentan. Program ini memberikan bantuan sosial dalam bentuk uang tunai yang disalurkan secara berkala kepada lansia yang memenuhi kriteria tertentu. KLJ bertujuan untuk memastikan bahwa lansia di Jakarta dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka serta memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial (Dinas Sosial DKI Jakarta, 2022).

#### **2.1.3.1 Pengertian Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ)**

Kartu Lansia Jakarta (KLJ) merupakan program bantuan sosial yang secara khusus diperuntukkan bagi warga lanjut usia yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, terutama lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap dan berada dalam kondisi sosial yang sulit. Melalui bantuan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa lansia di Jakarta dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik di usia senja.

Bantuan dalam program KLJ diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan secara berkala melalui rekening bank yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Lansia penerima manfaat akan mendapatkan kartu khusus yang berfungsi sebagai alat pencairan bantuan di bank yang telah bekerja sama

dengan pemerintah. Besaran bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku dan dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan anggaran daerah dan kondisi ekonomi yang berkembang. Dengan sistem pencairan yang terstruktur ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa bantuan tersebut dapat diterima langsung oleh lansia yang berhak tanpa adanya potensi penyalahgunaan atau pemotongan dari pihak lain.

Program KLJ memiliki tujuan utama untuk meringankan beban ekonomi yang dihadapi oleh lansia kurang mampu, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara lebih layak. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi konsumsi pangan yang cukup, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta pemenuhan kebutuhan lainnya seperti sandang, tempat tinggal, dan transportasi. Lansia yang tidak memiliki dukungan finansial dari keluarga atau yang hidup sendirian akan sangat terbantu dengan adanya bantuan sosial ini, karena mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain.

Selain memberikan manfaat finansial, program KLJ juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia. Lansia yang menerima bantuan ini secara tidak langsung memperoleh pengakuan dari pemerintah dan masyarakat bahwa mereka tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan psikologis lansia, karena mereka merasa lebih dihargai dan diperhatikan oleh lingkungan sekitar. Bantuan yang diberikan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,

seperti membeli obat-obatan, membayar biaya transportasi untuk berobat, atau bahkan mengikuti kegiatan sosial yang dapat menjaga kesehatan mental mereka.

Untuk memastikan bahwa bantuan sosial ini tepat sasaran, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 142 Tahun 2018 mengatur kriteria penerima manfaat KLJ.

Lansia yang berhak menerima bantuan ini harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya adalah berusia 60 tahun ke atas, tidak memiliki penghasilan tetap, serta tercatat dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh pemerintah daerah. Selain itu, lansia yang mengalami keterbatasan fisik, sakit menahun, atau hidup sendiri tanpa dukungan keluarga juga menjadi prioritas dalam penerimaan bantuan ini. Untuk mencegah kesalahan dalam penyaluran bantuan, pemerintah daerah secara rutin melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat, sehingga hanya lansia yang benar-benar membutuhkan yang dapat menerima bantuan.

Dalam pelaksanaannya, KLJ juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan pencairan dana, kesulitan administrasi bagi lansia yang tidak memiliki dokumen lengkap, serta kendala dalam pendataan penerima manfaat yang akurat. Beberapa lansia yang seharusnya memenuhi syarat terkadang tidak masuk dalam daftar penerima akibat kurangnya sosialisasi atau kendala teknis dalam proses pendaftaran. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh lebih banyak lansia yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Secara keseluruhan, Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) merupakan langkah strategis dalam memberikan perlindungan sosial bagi lansia di DKI

Jakarta, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Dengan adanya program ini, lansia yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap dapat tetap hidup dengan lebih layak dan tidak mengalami keterpurukan ekonomi yang dapat berdampak pada kesejahteraan mereka. Keberlanjutan program ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap lansia yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat yang optimal, sehingga mereka tetap dapat menjalani masa tua dengan lebih bermartabat dan sejahtera.

### **2.1.3.2 Tujuan Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ)**

Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) dirancang sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi lansia yang berada dalam kategori rentan. Lansia yang termasuk dalam kategori ini umumnya menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber pendapatan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, serta minimnya akses terhadap layanan kesehatan dan sosial. Oleh karena itu, program KLJ hadir sebagai bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan bahwa lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau hidup dalam kondisi ekonomi sulit tetap mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak dari pemerintah.

Salah satu tujuan utama program KLJ adalah memberikan perlindungan sosial bagi lansia yang berada dalam kondisi rentan. Perlindungan sosial ini mencakup bantuan finansial dalam bentuk tunai, yang disalurkan secara berkala untuk membantu lansia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya bantuan ini, lansia yang sebelumnya mengalami kesulitan ekonomi dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan, obat-obatan, dan kebutuhan

pokok lainnya. Selain itu, bantuan ini juga memberikan rasa aman bagi lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau dukungan finansial dari keluarga, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan bermartabat di usia senja.

Selain aspek perlindungan sosial, KLJ juga bertujuan untuk meningkatkan akses lansia terhadap layanan kesehatan. Lansia merupakan kelompok usia yang rentan terhadap berbagai penyakit degeneratif dan membutuhkan perawatan medis secara rutin. Banyak lansia yang kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai akibat keterbatasan ekonomi. Dengan adanya bantuan finansial dari KLJ, lansia dapat lebih mudah membayar biaya transportasi untuk berobat, membeli obat-obatan yang diperlukan, atau mendapatkan layanan kesehatan lainnya yang mendukung kondisi fisik mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dengan cara memastikan bahwa mereka menerima perawatan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Program KLJ juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan finansial untuk kebutuhan dasar lansia. Lansia yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit sering kali menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, dan akses terhadap kebutuhan sehari-hari lainnya. Bantuan tunai dari KLJ memungkinkan lansia untuk memiliki sedikit kemandirian dalam mengelola keuangan mereka, sehingga mereka tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan orang lain. Selain itu, bantuan ini juga dapat digunakan untuk keperluan mendesak, seperti pembayaran listrik, air, atau kebutuhan rumah tangga lainnya yang penting bagi kelangsungan hidup mereka.

Selain mendukung kesejahteraan individu lansia, KLJ juga memiliki dampak lebih luas dalam mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan lansia di Jakarta. Menurut data dari berbagai penelitian, kemiskinan di kalangan lansia sering kali terjadi karena keterbatasan kemampuan untuk bekerja dan minimnya sumber pendapatan yang stabil. Dalam banyak kasus, lansia yang tidak memiliki jaminan pensiun atau dukungan finansial dari keluarga mereka harus bergantung pada bantuan sosial untuk bertahan hidup. Dengan adanya KLJ, kelompok lansia yang rentan secara ekonomi mendapatkan bantuan langsung yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus mengalami tekanan ekonomi yang lebih besar.

Secara keseluruhan, Program KLJ berfungsi sebagai instrumen kebijakan sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan lansia di Jakarta. Dengan memastikan bahwa lansia mendapatkan dukungan finansial yang cukup, memiliki akses terhadap layanan kesehatan, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, program ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi lansia. Pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan implementasi program ini agar lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga manfaat yang diberikan dapat benar-benar dirasakan oleh lansia yang membutuhkannya.

### **2.1.3.3 Sasaran Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ)**

Sasaran utama Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) adalah lansia yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Program ini bertujuan untuk membantu lansia

yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik. Oleh karena itu, seleksi penerima manfaat KLJ dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh lansia yang membutuhkan.

Salah satu persyaratan utama penerima KLJ adalah lansia yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, yang mendefinisikan lansia sebagai individu yang telah berusia 60 tahun atau lebih. Lansia pada rentang usia ini umumnya telah mengalami berbagai perubahan dalam aspek fisik, sosial, dan ekonomi, termasuk penurunan produktivitas kerja yang mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan mereka. Oleh karena itu, lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar menjadi prioritas utama dalam program KLJ.

Selain kriteria usia, penerima KLJ harus berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang membutuhkan bantuan. Hal ini mencakup lansia yang hidup dalam kondisi miskin atau rentan miskin, tidak memiliki pekerjaan tetap, serta tidak memperoleh dukungan finansial yang memadai dari keluarga atau pihak lain. Banyak lansia yang mengalami kesulitan ekonomi karena tidak memiliki jaminan pensiun, sehingga mereka harus bergantung pada bantuan sosial atau dukungan dari anggota keluarga. Tidak semua lansia memiliki keluarga yang mampu memberikan dukungan ekonomi, sehingga bantuan dari pemerintah melalui KLJ menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial yang dapat membantu mereka bertahan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain faktor ekonomi, lansia yang memiliki kondisi sosial tertentu juga dapat menjadi penerima manfaat KLJ. Kondisi ini mencakup lansia yang hidup sendiri tanpa keluarga, lansia dengan disabilitas atau penyakit kronis yang menghambat aktivitas sehari-hari, serta lansia yang tinggal di lingkungan dengan keterbatasan akses terhadap layanan sosial dan kesehatan. Lansia yang berada dalam kategori ini sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri, sehingga bantuan dari KLJ diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang signifikan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka

Sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, penerima manfaat KLJ harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Data ini berfungsi sebagai acuan utama dalam menyeleksi calon penerima bantuan sosial agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem pendataan yang terintegrasi, pemerintah dapat mengidentifikasi lansia yang benar-benar membutuhkan bantuan serta mencegah adanya penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan.

Penerapan kriteria yang ketat dalam program KLJ bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan benar-benar menyentuh kelompok lansia yang paling membutuhkan. Dengan adanya bantuan ini, lansia yang berada dalam kondisi rentan diharapkan dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak, memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar, serta merasakan manfaat dari kebijakan perlindungan sosial yang diterapkan oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan lansia, serta mendukung kesejahteraan mereka agar tetap dapat hidup dengan martabat di usia senja.

#### **2.1.3.4 Implementasi Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ)**

Implementasi Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Sosial DKI Jakarta, bank penyalur, serta instansi lain yang bertugas dalam pendataan, verifikasi, dan pemantauan pelaksanaan program. Program ini dirancang agar berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran guna memberikan manfaat yang optimal bagi lansia penerima. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam implementasi KLJ dilakukan secara sistematis, mulai dari pendataan, penyaluran bantuan, hingga evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program.

Tahapan pertama dalam implementasi KLJ adalah pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat, yang dilakukan oleh petugas sosial di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pendataan ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada lansia yang benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI, serta hasil survei yang dilakukan di lapangan oleh petugas sosial. Calon penerima manfaat KLJ harus melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta, Kartu Keluarga (KK), dan bukti pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa mereka memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

Setelah proses verifikasi selesai, lansia yang dinyatakan memenuhi kriteria akan didaftarkan sebagai penerima manfaat KLJ dan menerima kartu elektronik yang digunakan untuk pencairan bantuan. Bantuan KLJ diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan melalui rekening bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah, seperti Bank DKI. Lansia penerima manfaat dapat mencairkan dana secara langsung di ATM atau melalui layanan perbankan lainnya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Pola pencairan ini bertujuan untuk mempermudah akses lansia terhadap bantuan sekaligus memastikan transparansi dalam penyaluran dana.

Selain memastikan kelancaran penyaluran bantuan, pemerintah daerah juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan KLJ disalurkan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi program, seperti kesalahan dalam pendataan, keterlambatan pencairan dana, atau kendala teknis dalam penggunaan kartu bantuan. Jika ditemukan permasalahan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah perbaikan agar efektivitas program dapat terus ditingkatkan (Dinas Sosial DKI Jakarta, 2023).

#### **2.1.3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi KLJ**

Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi program KLJ. Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial bagi lansia, adanya regulasi yang jelas, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi sosial

dan komunitas lansia. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan juga menjadi faktor yang mempercepat dan mempermudah implementasi program (Dinas Sosial DKI Jakarta, 2023).

Terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan program KLJ. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi jumlah penerima manfaat dan besaran bantuan yang diberikan. Selain itu, masih terdapat kendala dalam validasi data penerima, di mana beberapa lansia yang membutuhkan bantuan belum terdaftar dalam DTKS. Hambatan lainnya adalah kurangnya pemahaman lansia mengenai prosedur pencairan dana serta keterbatasan akses ke fasilitas perbankan bagi lansia yang memiliki mobilitas terbatas (Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 142 Tahun 2018).

#### **2.1.4 Tinjauan tentang Peran Pekerja Sosial bagi Lanjut Usia**

Pekerjaan sosial merupakan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan ilmiah dan praktik berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Pekerjaan sosial memiliki peran penting dalam membantu individu yang mengalami permasalahan sosial, termasuk lansia yang berada dalam kondisi rentan. Dalam konteks implementasi Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), pekerja sosial berperan dalam proses asesmen, intervensi, dan pendampingan bagi lansia penerima manfaat agar program ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan lansia.

#### **2.1.4.1 Definisi Pekerja Sosial**

Pekerjaan sosial adalah profesi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan manusia melalui intervensi berbasis teori sosial dan praktik profesional. Profesi ini memiliki peran strategis dalam menangani berbagai permasalahan sosial, baik yang dialami oleh individu, keluarga, kelompok, maupun komunitas. Menurut International Federation of Social Workers (IFSW, 2014), pekerjaan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas dengan cara mengatasi tantangan sosial, meningkatkan kualitas hidup, serta memperjuangkan hak-hak sosial bagi kelompok rentan. Profesi ini menekankan pada keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Sebagai profesi yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan, pekerjaan sosial berperan dalam memberikan dukungan dan intervensi kepada individu atau kelompok yang mengalami masalah sosial, ekonomi, psikologis, maupun kesehatan. Pekerja sosial tidak hanya membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dalam mengembangkan kapasitas individu dan komunitas agar mereka dapat menghadapi tantangan sosial secara mandiri. Pendekatan holistik dalam pekerjaan sosial memungkinkan intervensi yang tidak hanya menyentuh aspek individual, tetapi juga mencakup aspek struktural, seperti kebijakan publik dan sistem sosial yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, pekerja sosial memiliki berbagai peran utama, seperti pendamping, advokat, fasilitator, mediator, edukator, dan agen perubahan sosial. Sebagai pendamping, pekerja sosial membantu individu atau kelompok dalam

menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik dalam bentuk kemiskinan, ketidakmampuan fisik, keterbatasan akses terhadap layanan sosial, hingga diskriminasi. Sebagai advokat, pekerja sosial memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok rentan agar mereka mendapatkan akses yang setara terhadap layanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam peran sebagai fasilitator, pekerja sosial membantu dalam menghubungkan individu atau kelompok dengan sumber daya yang tersedia di komunitas maupun instansi terkait.

Selain berfokus pada intervensi terhadap individu, pekerjaan sosial juga memiliki peran besar dalam perubahan sosial secara struktural. Profesi ini berkontribusi dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi kebijakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pekerja sosial sering kali terlibat dalam berbagai program sosial yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, memberdayakan kelompok rentan, serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam konteks Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), pekerja sosial memiliki peran penting dalam berbagai aspek implementasi program. Mereka bertugas melakukan pendataan, asesmen, pendampingan, hingga evaluasi terhadap lansia yang menjadi penerima manfaat. Pekerja sosial memastikan bahwa bantuan sosial diberikan secara tepat sasaran, serta membantu lansia dalam mengakses layanan sosial dan kesehatan yang mendukung kesejahteraan mereka. Selain itu, pekerja sosial juga berperan dalam memberikan edukasi kepada lansia, baik dalam

hal pengelolaan bantuan keuangan, peningkatan kesejahteraan psikososial, maupun partisipasi dalam aktivitas sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pekerjaan sosial bukan hanya sekadar profesi yang memberikan bantuan kepada individu yang membutuhkan, tetapi juga memiliki peran besar dalam membangun sistem sosial yang lebih adil dan inklusif. Melalui pendekatan berbasis empati, keadilan sosial, dan pemberdayaan, pekerja sosial menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan dan membutuhkan perhatian khusus.

#### **2.1.4.2 Peran Pekerja Sosial bagi Lansia**

Pada implementasi Program Kartu Lansia Jakarta (KLJ), pekerja sosial memiliki beberapa peran utama, antara lain sebagai fasilitator, advokat, dan pendamping. Sebagai fasilitator, pekerja sosial membantu lansia dalam mengakses informasi mengenai program KLJ, termasuk prosedur pendaftaran, persyaratan, serta hak dan kewajiban penerima manfaat. Sebagai advokat, pekerja sosial berperan dalam memperjuangkan hak-hak lansia agar mereka mendapatkan bantuan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa lansia yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai syarat utama penerimaan manfaat KLJ (Dinas Sosial DKI Jakarta, 2022).

Selanjutnya, dalam peran advokasi pekerja sosial tidak hanya memperjuangkan hak lansia untuk memperoleh bantuan sosial yang layak, tetapi juga berupaya menghilangkan stigma, diskriminasi, dan hambatan struktural yang

membatasi partisipasi lansia dalam kehidupan sosial. Pekerja sosial turut memastikan lansia yang rentan dan terpinggirkan dapat terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai prasyarat utama untuk memperoleh manfaat dari program KLJ. Fungsi advokasi ini juga mencakup kerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lansia.

Pekerja sosial juga bertindak sebagai pendamping yang memberikan dukungan kepada lansia yang bersifat holistik, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Pekerja sosial mendampingi lansia dalam proses pencairan bantuan, melakukan asesmen berkala, serta mengevaluasi dampak program terhadap kesejahteraan lansia. Pendampingan ini juga mencakup pemberian motivasi, dukungan emosional, serta penguatan kapasitas lansia untuk tetap aktif secara sosial dan produktif sesuai dengan kemampuannya. Dengan pendekatan yang berfokus pada individu, keluarga, dan komunitas, pekerja sosial berperan penting dalam memastikan bahwa program KLJ tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga transformasional mampu meningkatkan martabat, partisipasi, dan kualitas hidup lansia secara berkelanjutan. (IFSW, 2014).